

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan otonomi daerah mempunyai kewajiban setiap kebijakan pemerintah kreatif dalam mencari sumber- sumber keuangan secara aktif demi mendapatkan berbagai keuntungan yang mampu dijadikan sumber pemasukan kas untuk daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan menjadi tujuan disetiap negara yang dimana kondisi ini berubah pada perekonomian suatu negara baik secara berkesinambungan guna mencapai keadaan yang lebih baik, yang mempengaruhi baik dari menaikkan taraf kehidupan antar masyarakat, peluang adanya lapangan kerja, tersebar luasnya pembagian penghasilan masyarakat. Perkembangan ekonomi pada suatu Negara bisa dikatakan bernilai positif bila aktivitas ekonominya meningkat. serta akan bernilai negatif ketika aktivitas ekonominya mengalami pengurangan (Sukirno, 2004). Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah serta pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Pengangguran, keterbatasan modal dan rendahnya kualitas sumber

daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi barang maupun jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Nilai perekonomian pada suatu wilayah/negara bisa disebut mengalami kemajuan pertambahan bila total balas jasa riil pada sektor-sektor produksi di periode tersebut lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Ekonomi Indonesia 2022 terhadap tahun 2021 tumbuh sebesar 5,44 persen . Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen (Sumber BPS). Peristiwa ini menunjukkan Negara Indonesia memiliki peluang tinggi pada meningkatkan perekonomian yang mampu sebagai dasar utama mencapai kesejahteraan suatu negara.

Kinerja ekonomi Jawa Timur pada awal tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan tren perkembangan perekonomian di wilayah Jawa. Pada laporan kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,20% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,59% (yoy). Perbaikan kinerja dari sisi permintaan didorong oleh

lebih tingginya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, serta ekspor luar negeri. Secara umum, pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai implikasi percepatan vaksinasi Covid-19 dan penurunan laju penyebaran COVID-19 varian Omicron pada akhir 2022, mendorong perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor ekonomi produktif di Jawa Timur. Hal tersebut pada gilirannya turut meningkatkan permintaan domestik yang tercermin dari lebih tingginya pertumbuhan konsumsi RT pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023.

Kenaikan permintaan domestik dan global sebagai implikasi dari dibukanya kembali sektor- sektor ekonomi produktif sejalan dengan percepatan vaksinasi Covid-19, penurunan kasus Covid-19 varian Omicron pada akhir 2022 serta pelonggaran kebijakan PPKM menjadi faktor pendorong utama perbaikan kinerja LU. Dari sisi penawaran, mayoritas Lapangan Usaha (LU) di Jawa Timur, termasuk LU Industri Pengolahan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan, mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja pertumbuhan LU utama Industri Pengolahan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, sementara kinerja pertumbuhan LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Konstruksi melambat pada awal 2022. Lebih lanjut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan pada mayoritas LU di Jawa Timur didorong oleh berlanjutnya aktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin membaik.

Percepatan vaksinasi Covid-19 serta masih berlanjutnya stimulus kebijakan seperti insentif pembiayaan pada UMKM dan korporasi, serta fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dapat meringankan pembiayaan bagi pelaku industri turut mendorong perbaikan kinerja LU utama di Jawa Timur

(Laporan keuangan BI).

Pembangunan ekonomi di setiap wilayah merupakan unsur pembangunan ekonomi nasional. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi wilayahnya bisa ditinjau dari total nilai PDRB setiap tahun melalui daerahnya masing-masing yang mampu meningkatkan disetiap tahunnya. Dapat di artikan, PDRB bisa dinyatakan berkembang. Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang besar dalam menaikkan perekonomian baik berasal pada bidang ekonomi, kelautan ataupun pariwisata.

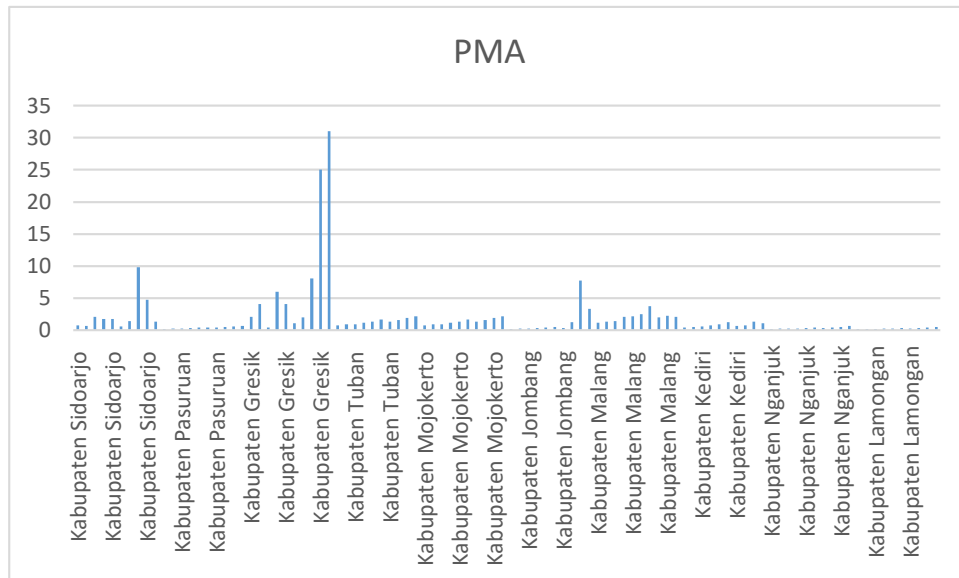
Tabel 1.1 PDRB 10 kabupaten di Jawa Timur 2014-2023 (triliun rupiah)

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sidoarjo	180	195	210	225	245	265	250	280	310	330
Pasuruan	90	96	103	110	118	126	120	135	155	170
Gresik	120	128	136	145	155	165	158	175	210	230
Tuban	45	48	52	56	61	66	62	70	82	91
Mojokerto	45	48	52	56	61	66	62	70	82	91
Jombang	55	59	63	67	72	78	74	83	110	120
Malang	65	69	74	79	85	92	87	95	110	120
Kediri	55	59	63	68	74	80	76	84	105	115
Nganjuk	40	43	46	49	53	58	54	60	78	85
Lamongan	25,7	28.7	31.7	34.7	37.2	39.7	39.1	41	45.4	48.9

Sumber : bps.go.id 2014-2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo selalu menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2014–2023, naik dari 180 triliun (2014) menjadi 330 triliun (2023). Hal ini menunjukkan Sidoarjo sebagai pusat ekonomi penting di Jawa Timur, dengan pertumbuhan relatif stabil meskipun sempat turun di 2020 (pandemi). Akibat Covid-19 Hampir semua kabupaten mengalami penurunan di 2020 (contoh: Kabupaten Sidoarjo turun dari 265 triliun ke 250 triliun ; Kabupaten Gresik dari 165 triliun ke 158 triliun). Setelah itu, terjadi rebound di 2021–2023, menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Melihat fenomena diatas bahwasannya investasi adalah proses pengeluaran dengan tujuan menaikkan skill masyarakat dalam menaikkan kegiatan produktivitas. Dengan begitu dapat dikatakan bahwasannya investasi adalah proses pengeluaran yang mengakibatkan penambahan pada jumlah kegiatan dari produktivitas di tengah masyarakat yang berdampak pada pendapatan yang semakin bertambah, sebagai akibatnya PDRB semakin tinggi serta pula investasi yang posisinya sebagai motivasi maupun media dari aplikasi pembangunan perekonomian terutama untuk proses pengupayaan perluasan pengguna energi kerja untuk menaikkan produk (output).

Gambar 1.1 Data PMA 10 Kabupaten di Jawa Timur 2014-2023

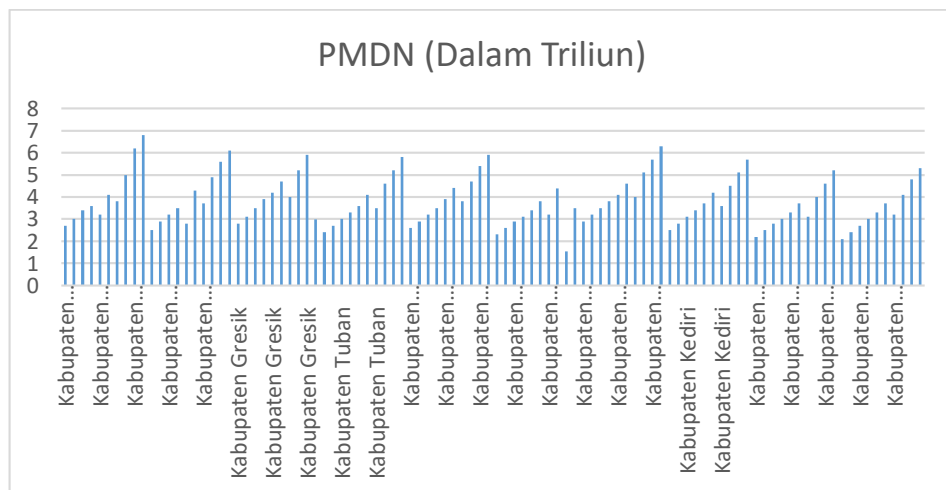


Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik Penanaman Modal Asing (PMA) yang disajikan dalam satuan triliun rupiah, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Distribusi PMA menunjukkan kecenderungan tidak merata, dengan konsentrasi investasi yang tinggi pada beberapa daerah tertentu. Kabupaten Gresik menempati posisi tertinggi dengan nilai PMA yang sangat dominan dibandingkan daerah lainnya, bahkan mencapai lebih dari 30 triliun rupiah pada salah satu periode pengamatan. Selain itu, terdapat beberapa nilai lain yang juga relatif tinggi pada kabupaten ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Gresik memiliki daya tarik investasi yang kuat, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri, infrastruktur pendukung, serta aksesibilitas yang baik. Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan kontribusi PMA yang cukup besar dengan beberapa nilai yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, meskipun masih berada di bawah Kabupaten Gresik. Sementara itu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri berada pada kategori menengah dengan nilai investasi yang cukup stabil dan sesekali

mengalami peningkatan. Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Lamongan cenderung menunjukkan nilai PMA yang lebih rendah dan relatif stabil tanpa lonjakan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi asing di daerah-daerah tersebut masih terbatas dibandingkan wilayah yang memiliki basis industri yang lebih kuat. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan distribusi PMA antar wilayah. Investasi asing cenderung terkonsentrasi pada daerah dengan infrastruktur industri dan ekonomi yang lebih berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerataan investasi melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta pengembangan sektor unggulan daerah guna mendorong peningkatan PMA di wilayah dengan nilai investasi yang masih rendah.

Gambar 1.2 data PMDN 10 Kabupaten di Jawa Timur 2014-2023



Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur

Grafik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menunjukkan perkembangan nilai investasi domestik di beberapa kabupaten selama periode pengamatan, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Tuban, Mojokerto, Jombang, Malang, Kediri, Nganjuk, dan Lamongan. Secara umum, nilai PMDN di masing-masing kabupaten mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, yang

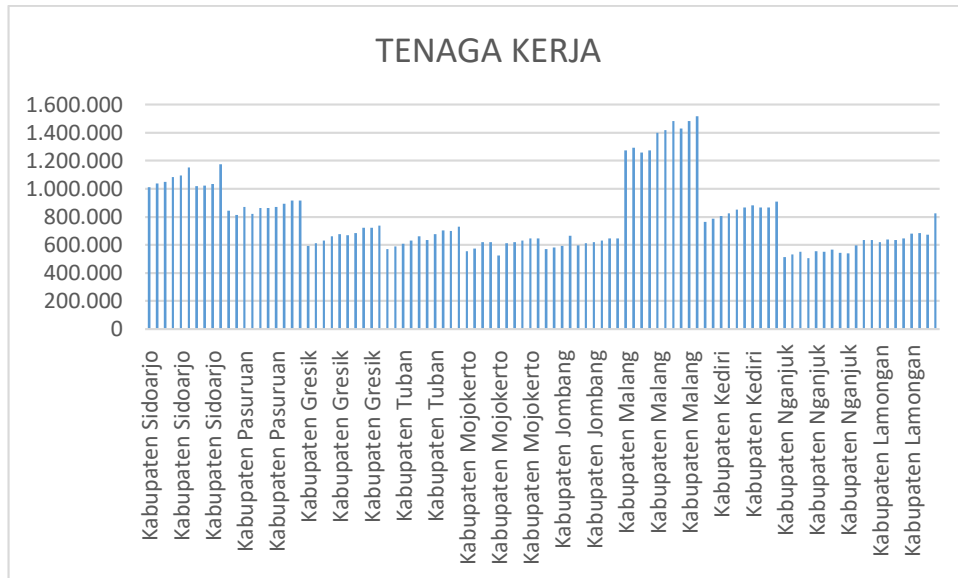
menunjukkan adanya dinamika dalam aktivitas investasi domestik di setiap daerah.

Kabupaten dengan nilai PMDN relatif tinggi antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang, yang mencapai kisaran nilai di atas 5 hingga mendekati 7 pada beberapa periode. Tingginya nilai PMDN di wilayah tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik investasi yang baik, didukung oleh perkembangan sektor industri, infrastruktur, serta potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Lamongan menunjukkan nilai PMDN yang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, meskipun tetap mengalami peningkatan secara bertahap pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi domestik di wilayah tersebut masih berkembang dan memiliki potensi untuk terus meningkat.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa PMDN di seluruh kabupaten mengalami fluktuasi namun cenderung menunjukkan perkembangan yang positif. Perbedaan nilai PMDN antar kabupaten mencerminkan perbedaan tingkat daya tarik investasi, potensi ekonomi, serta tingkat perkembangan sektor industri dan infrastruktur di masing-masing daerah.

Gambar 1.3 Data Tenaga Kerja 10 Kabupaten di Jawa Timur 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja di beberapa kabupaten yang menjadi objek pengamatan, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Tuban, Mojokerto, Jombang, Malang, Kediri, Nganjuk, dan Lamongan dalam beberapa periode waktu. Secara umum, terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan antar kabupaten, yang mencerminkan perbedaan tingkat aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, serta perkembangan sektor industri dan jasa di masing-masing wilayah.

Kabupaten dengan jumlah tenaga kerja tertinggi adalah Kabupaten Malang, dengan jumlah yang mencapai kisaran lebih dari 1.300.000 hingga mendekati 1.500.000 jiwa pada periode tertentu. Tingginya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki basis ekonomi yang kuat dan jumlah penduduk usia kerja yang besar, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan jumlah tenaga kerja yang relatif tinggi, yaitu berada pada kisaran sekitar 1.000.000 hingga lebih dari 1.100.000 jiwa. Hal ini dapat dikaitkan dengan karakteristik Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah

industri yang berkembang pesat, sehingga mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Pasuruan, Gresik, Tuban, Mojokerto, Jombang, Kediri, dan Lamongan menunjukkan jumlah tenaga kerja pada kategori menengah, yaitu berkisar antara 600.000 hingga 900.000 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup baik, meskipun belum setinggi Kabupaten Malang dan Sidoarjo. Perkembangan sektor industri, pertanian, dan perdagangan di wilayah-wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja.

Di sisi lain, Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten dengan jumlah tenaga kerja relatif paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu berada pada kisaran sekitar 500.000 hingga 600.000 jiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk yang lebih sedikit, tingkat industrialisasi yang relatif lebih rendah, serta keterbatasan peluang kerja dibandingkan wilayah lain yang lebih berkembang.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan adanya kecenderungan fluktuasi dan peningkatan jumlah tenaga kerja di beberapa kabupaten selama periode pengamatan. Perbedaan jumlah tenaga kerja antar kabupaten mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, jumlah penduduk usia produktif, serta ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kabupaten dengan tingkat perkembangan ekonomi dan industrialisasi yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan kabupaten dengan tingkat perkembangan ekonomi yang relatif lebih rendah.

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan modal, sementara tenaga kerja sebagai faktor produksi utama berkontribusi pada produktivitas dan output wilayah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara simultan PMA, PMDN, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun hasil parsial bervariasi antar wilayah misalnya, dalam penelitian Bambang Muqsyitu Wihda (2013), PMA dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan, sedangkan di Jawa Timur periode 2016-2020, hanya tenaga kerja yang menunjukkan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, analisis terhadap kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan spesifik antara variabel-variabel tersebut dan PDRB.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah PMA Jawa Timur berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah PMDN berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PMA di Jawa Timur terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?
2. Mengetahui dan menganalisis PMDN di Jawa Timur terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?
3. Mengetahui dan menganalisis PMDN di Jawa Timur terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tingkat investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di provinsi Jawa timur serta pengaruhnya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Selain itu dapat menjadi tambahan literatur atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi, serta gambaran umum kepada masyarakat tentang pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa timur, sehingga masyarakat mengetahui pengaruh penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap produk domestik regional bruto sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa timur. dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang investasi di provinsi Jawa timur.